

Sistem Pendidikan di Thailand



**Atase Pendidikan KBRI Bangkok
Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok
2014**

Ditulis oleh: Dr. Ir. Yunardi, MAsc.

Kantor Atase Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok
© 2014

Sumber foto Wat Arun: 9holidayscouk.wordpress.com

Executive Summary

Sistem Pendidikan di Thailand

Thailand, negara yang memiliki penduduk hampir 70 juta jiwa ini, memiliki sistem pendidikan yang mirip seperti yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang signifikan terletak pada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi di Thailand menerapkan lama belajar 5 (lima) tahun dimana tamatannya setara dengan lulusan diploma 2 tahun di Indonesia, sementara pendidikan vokasi di Indonesia menerapkan lama belajar 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, di Thailand tidak dikenal perguruan tinggi Politeknik seperti di Indonesia. Politeknik di Thailand berperan sebagai institusi '*long-life learning*' atau institusi yang memberikan sertifikat bagi keahlian tertentu, seperti mengelas, menjahit dll. Thailand juga menerapkan wajib belajar 9 tahun, seperti di Indonesia, namun pendidikan gratis diberikan sampai tamat sekolah menengah atas.

Penjaminan mutu di jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan melalui ujian nasional. Akan tetapi, hasil ujian nasional di Thailand tidak memutuskan seorang siswa lulus atau tidak dari jenjang sekolah tersebut. Kelulusan siswa dari sekolah lebih ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian nasional hanya menunjukkan capaian akademik siswa dari seluruh propinsi, yang dijadikan sebagai acuan kebijakan perbaikan kualitas pendidikan.

Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi dan terbuka sehingga calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang dan potensial. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sarjana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut master bahkan sampai doktor.

Salah satu reformasi pendidikan di Thailand yang menarik adalah pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program yang disebut *One Tablet Per Child* atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertujuan memperkuat siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai saat ini telah mengeluarkan dana sebesar 3 milyar bath atau setara dengan 96 juta USD untuk membeli sebanyak 900 ribu komputer tablet pada tahun 2012 untuk didistribusikan kepada siswa kelas 1 SD di seluruh Thailand. Pada tahun 2013,

Pemerintah Thailand mendistribusikan sebanyak 1.63 juta computer tablet bagi siswa kelas 1 SD dan siswa kelas 1 SMP di seluruh Thailand.

Daftar Isi

Sistem Pendidikan di Thailand.....	1
Atase Pendidikan KBRI Bangkok.....	1
Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok.....	1
2014.....	1
Daftar Isi.....	1
1 Pendahuluan.....	3
1.1 Gambaran Umum.....	3
1.2 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.....	4
1.3 Pendidikan Vokasi dan Teknik.....	5
1.4 Pendidikan Tinggi.....	6
2 Kurikulum Pendidikan Dasar Thailand.....	8
2.1 Gambaran Umum.....	8
2.2 Visi Kurikulum Inti 2008.....	9
2.3 Prinsip-prinsip Kurikulum Inti 2008.....	9
2.4 Sasaran Kurikulum Inti 2008.....	10
2.5 Kompetensi Kunci Siswa.....	10
2.6 Karakter anak didik yang diharapkan.....	11
2.7 Standar Pembelajaran.....	12
2.8 Indikator.....	12
2.9 Alokasi Waktu Belajar.....	13
2.10 Penetapan Struktur Waktu Belajar dan Waktu Tambahan.....	14
3 Evaluasi Pendidikan di Thailand.....	17
3.1 Ujian Nasional Untuk <i>Prathom - Mattayom</i>	17
3.2 Ujian Masuk Universitas.....	22
4 Standar Pendidikan dan Penjaminan Mutu.....	24

4.1	Standar Pendidikan Nasional	24
4.2	Penjaminan Mutu Internal	25
4.3	Penjaminan Mutu Eksternal.....	25
5	Pengembangan dan Pembinaan Guru.....	28
5.1	Pengembangan Pendidikan Guru	28
5.2	Kualifikasi dan Perekrutan Guru.....	28
5.3	Pelatihan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah	31
5.4	Remunerasi dan Promosi	33
6	Pendanaan Pendidikan	39
6.1	Pendanaan Sekolah Negeri dan Swasta.....	39
6.2	Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan	42
7	Penutup	44
	Daftar Referensi.....	45

1 Pendahuluan

1.1 Gambaran Umum

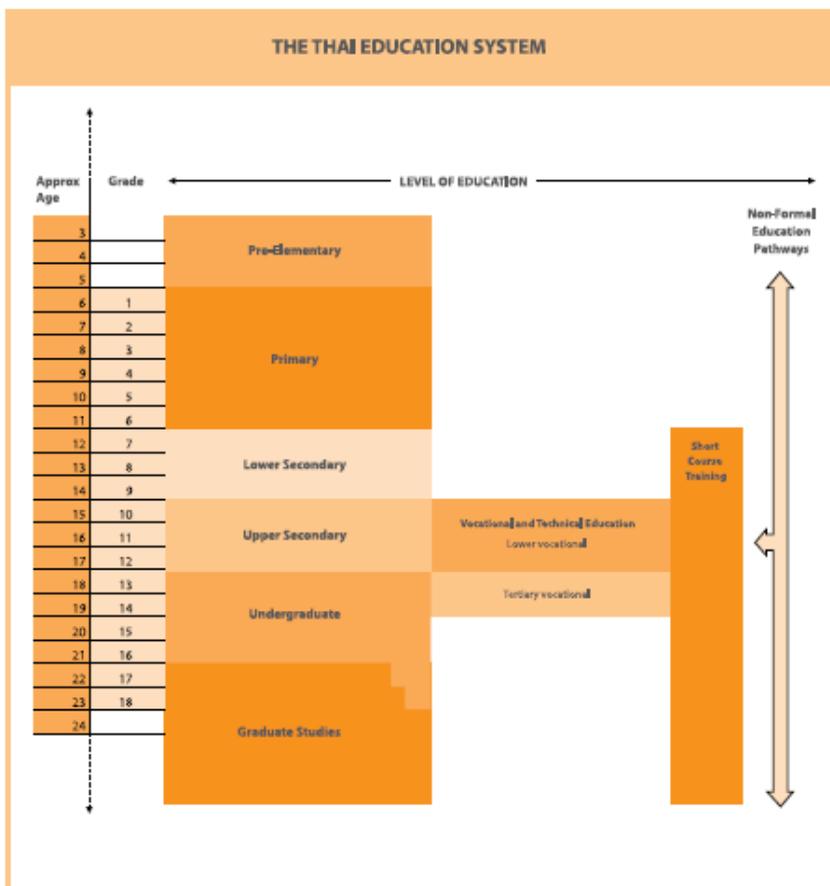
Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh Raja Rama IX, Raja Bhumibol Adulyadej, sebagai kepala negara dan Perdana Menteri, saat ini Yingluck Shinawatra, sebagai kepala pemerintahan. Thailand dibagi ke dalam 76 daerah pemerintahan (propinsi) yang dikenal dengan sebutan *changwats* dan 2 (dua) Daerah Khusus Bangkok dan Pattaya. Propinsi selanjutnya dibagi ke dalam sejumlah distrik (setara dengan kabupaten) dan sub-distrik (setara dengan kecamatan). Populasi penduduk Thailand sebagian besar terdiri dari suku Thai dan sejumlah suku minoritas seperti Cina, Akha, Lisu, Karen, Hmong, suku-suku pegunungan di daerah utara Thailand dan Melayu di Thailand selatan.

Sistem pendidikan Thailand saat ini didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan ini terletak pada implementasi kebijakan yang seragam, fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang dan mobilisasi sumber daya. Perubahan-perubahan penting tersebut mencakup:

1. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas.
2. Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat
3. Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas (*Office for National Education Standards and Quality Assessment*, ONESQA), yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal.

Sistem pendidikan Thailand menerapkan 9 tahun wajib belajar, dengan 12 tahun pendidikan gratis sampai menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas. Gambar 1.1 menunjukkan struktur pendidikan di Thailand yang secara umum terdiri dari 3 tahun *Anuban* atau taman kanak-kanak, 6 tahun *Prathom* (sekolah dasar), 6 tahun *Mattayom* (sekolah menengah pertama dan atas), pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Wajib belajar di Thailand menerapkan keharusan bagi anak-anak untuk mulai sekolah di *Prathom* 1 atau kelas 1 sekolah dasar mulai umur 6 tahun. Walaupun tidak ada kewajiban anak-anak untuk ikut *Anuban* (TK) sebelum

masuk SD, namun sebagian besar orang tua mengirimkan anak-anaknya untuk masuk TK.



Gambar 1.1 Struktur Pendidikan di Thailand (Ministry of Education, 2008b)

1.2 Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar

Lebih dari 75 % anak-anak usia 3-5 tahun mendapatkan pendidikan usia dini. Walaupun pada hakikatnya pendidikan usia dini disediakan oleh pemerintah melalui sekolah-sekolah dasar negeri, Kementerian Pendidikan secara aktif mendorong sekolah-sekolah swasta dan pemerintah daerah untuk dapat memainkan

peranan yang signifikan untuk ikut terlibat dalam pendidikan usai dini. Oleh karena itu, akhir-akhir ini terlihat banyak sekali pendidikan usia dini yang ditawarkan oleh institusi pendidikan swasta. Hal ini tampak jelas di Bangkok dan sekitarnya, ditandai dengan tumbuhnya sejumlah lembaga pendidikan dini yang dikelola oleh swasta.

Pendidikan dasar di Thailand dimaksudkan sebagai 12 tahun belajar yang dibagi menjadi 6 tahun sekolah dasar (*Prathom 1-6*), diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah pertama (*Mattayom 1-3*) dan 3 tahun sekolah menengah atas (*Mattayom 4-6*). Sejak tahun 2003, wajib belajar telah diperluas sampai 9 tahun (6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah pertama), namun pendidikan sekolah digratiskan sampai 12 tahun sehingga siswa diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan sampai *Mattayom 6*, atau setara dengan tamat SMU.

Secara umum sekolah *Prathom* terpisah dari sekolah *Mattayom*, namun di beberapa tempat di Thailand di jumpai sekolah yang memberikan pelayanan pendidikan mulai dari *Prathom 1* sampai dengan *Mattayom 6*. Dalam hal sekolah menengah umumnya, pendidikan *Mattayom 1-6* berada di dalam satu sekolah, akan tetapi dapat dijumpai pendidikan *Mattayom* yang dilayani oleh dua sekolah yang terpisah, yaitu sekolah yang melayani *Mattayom 1-3* dan sekolah yang melayani *Mattayom 4-6*.

Kurikulum nasional memuat 8 mata pelajaran inti yaitu: Bahasa Thai, Matematika, Sains, Ilmu Sosial, Agama dan Budaya, Kesehatan dan Olah raga, Seni, Karir dan Teknologi, dan Bahasa Asing. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran. Dengan diterapkannya wajib belajar, angka partisipasi kasar (APK) untuk tingkat sekolah dasar cukup tinggi mencapai 98.3 persen untuk populasi anak berumur 6-11 tahun (2010). Sementara APK untuk sekolah menengah pertama pada tahun 2010 menunjukkan lebih besar dari 90 persen, namun pada tingkat menengah atas hanya berkisar sebesar 60 persen (Unesco, 2011).

1.3 Pendidikan Vokasi dan Teknik

Pendidikan vokasi dan teknik secara formal dilaksanakan dengan tiga tingkatan: tingkat menengah atas (setara dengan SMK di Indonesia) dengan masa studi 3 tahun, tingkat diploma dengan masa studi 2 tahun dan tingkat sarjana dengan masa studi 2 tahun setelah menyelesaikan tingkat diploma. Pendidikan vokasi dan teknik dilaksanakan pada *technical college*, misalnya *Minburi Technical College* dll. Namun saat ini sebagian besar *technical college* di Thailand hanya menawarkan program 5 tahun yang terdiri dari 3 tahun tingkat menengah atas dan 2 tahun diploma, sehingga siswa umumnya menghabiskan masa 5 tahun hingga selesai dari *college* seperti ini.

Hanya segelintir *college* yang menawarkan program tingkat sarjana. Program studi yang ditawarkan di *technical college* dapat dikategorikan menjadi 8 konsentrasi yaitu: perdagangan dan industri, pertanian, ekonomi, bisnis dan pariwisata, seni dan kerajinan, tekstil dan pemasaran. Yang menarik dari pendidikan vokasi di Thailand adalah peluang bagi mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan sertifikat keahlian sangat terbuka.

1.4 Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Thailand dijalankan di universitas, institut teknik, sekolah tinggi (*college*) profesi dan teknik dan universitas pendidikan. Pendidikan tinggi di Thailand dapat dibagi menjadi dua institusi. Yang pertama, institusi pendidikan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan, seperti universitas negeri dan swasta, institusi profesi/teknik dan pertanian, dan sekolah tinggi (*college*) pendidikan guru. Yang kedua institusi-institusi khusus yang berada di bawah kementerian lain, seperti sekolah tinggi seni Thai klasik yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan, sekolah tinggi keperawatan yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, dll.

Perubahan-perubahan yang mendasar pada pendidikan tinggi terlihat dari meningkatnya jumlah universitas swasta dalam beberapa tahun belakangan ini. Dalam hal universitas negeri, perubahan terlihat pada:

1. Universitas-universitas negeri telah menjadi lebih independen
2. Institusi yang dulunya dikategorikan sebagai Rajabhat (universitas yang berkonsentrasi menghasilkan guru), sekarang telah berubah menjadi universitas komprehensif sehingga menawarkan program-program lain selain pendidikan
3. Sebanyak 35 *Rajamangala Institutes of Technology* yang tersebar di seluruh Thailand sekarang dibentuk menjadi 9 universitas regional, tanpa merubah nama institusinya. Artinya, setiap regional *Rajamangala Institutes of Technology* memiliki beberapa kampus.

Perkembangan lain yang sangat mendasar pada pendidikan tinggi Thailand terlihat dengan lahirnya universitas riset. Sejak tahun 2009 Komisi Pendidikan Tinggi Thailand telah menetapkan 9 universitas negeri sebagai universitas riset, dalam rangka meningkatkan kualitas universitas di Thailand terutama dalam bidang riset. Universitas-universitas ini melalui pendanaan riset dari pemerintah Thailand diharapkan dapat memainkan peranan dalam membuat Thailand sebagai pusat pendidikan, riset dan pengembangan ilmu. Universitas-universitas ini mendidik calon peneliti yang berfokus kepada penyelesaian masalah-masalah ekonomi dan sosial di Thailand. Ke 9 universitas yang dimaksud adalah *Chulalongkorn University, Kasetsart*

University, Chiang Mai University, Khon Kaen University, Thammasat University, Mahidol University, Prince of Songkla University, Suranaree University of Technology dan King Mongkut's University of Technology Thonburi.

Saat ini lebih dari 2,2 juta mahasiswa belajar di universitas negeri dan swasta di Thailand. Angka partisipasi universitas telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir ini dari rata-rata 26% menjadi 40%. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena meningkatnya kesempatan kuliah akibat penambahan universitas swasta. Saat ini ada 78 universitas negeri dan 89 universitas swasta di Thailand.

2 Kurikulum Pendidikan Dasar Thailand

2.1 Gambaran Umum

Sejak tahun 2002 Kementerian Pendidikan Thailand telah menerapkan kurikulum pendidikan dasar 2001. *Monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum 2001 selama kurun 6 tahun telah menunjukkan kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan Kurikulum 2001. Sebagai contoh, Kurikulum 2001 memberikan kesempatan desentralisasi otoritas pendidikan, memberikan kesempatan komunitas lokal dan sekolah untuk berpartisipasi dan memainkan peranan penting untuk mempersiapkan kurikulum sehingga memenuhi keinginan mereka. Namun demikian, hasil evaluasi terhadap kurikulum 2001 ini menunjukkan sejumlah kelemahan yang berkaitan dengan kurikulum itu sendiri, meliputi penerapannya, proses pelaksanaannya, kesulitan guru dan praktisi dalam mempersiapkan kurikulum sekolahnya. Banyak sekolah sangat berambisi membuat konten pembelajaran dan keluaran yang diharapkan namun pada saat ujian dan penilaian tidak sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas anak didik dalam menyerap pengetahuan dasar dan ketrampilan yang diharapkan cukup mengecewakan.

Atas dasar temuan-temuan di atas, Kantor Komisi Pendidikan Dasar (*Office of Basic Education Commission*, OBEC) di bawah supervisi Komisi Pendidikan Dasar mengambil tindakan untuk merevisi Kurikulum Pendidikan Dasar 2001 guna mempersiapkan Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008. Kurikulum Inti Pendidikan Dasar (KIPD) 2008 dirancang dengan memberikan penekanan kepada kesesuaian. Peningkatan-peningkatan dibuat dalam tujuan dan proses pelaksanaan kurikulum pada tingkat kantor dinas dan sekolah. Asas desentralisasi masih tetap diutamakan di dalam KIPD 2008, dengan memberikan kesempatan kepada komunitas lokal dan sekolah untuk mengembangkan kurikulum sekolah. Kegiatan belajar-mengajar yang diterapkan untuk seluruh anak didik Thailand pada pendidikan dasar diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik dalam penguasaan pengetahuan dasar dan kecakapan hidup yang dibutuhkan dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Oleh karena itu mereka harus dibekali dengan semangat untuk mencari pengetahuan guna mengembangkan diri secara berkesinambungan.

2.2 Visi Kurikulum Inti 2008

Kurikulum Inti pendidikan Dasar 2008 bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seluruh siswa yang merupakan kekuatan utama negara sehingga mendapatkan pengembangan yang seimbang di seluruh aspek – kekuatan fisik, ilmu pengetahuan dan moralitas. Anak didik diharapkan sadar terhadap komitmen dan tanggung-jawabnya sebagai warga negara Thailand juga sebagai anggota komunitas dunia. Terikat bentuk pemerintahan demokrasi di bawah konstitusi monarki, anak didik harus dibekali dengan pengetahuan dasar dan ketrampilan-ketrampilan penting dan karakter yang baik bagi studi lanjut, kecakapan hidup dan belajar sepanjang hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang berpusat kepada anak didik perlu dilaksanakan, yang berlandaskan pada kenyataan bahwa setiap orang punya kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri untuk mencapai potensi tertinggi masing-masing.

2.3 Prinsip-prinsip Kurikulum Inti 2008

Prinsip-prinsip yang penting yang mendasari Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran utama pengembangan kurikulum ini adalah mencapai persatuan nasional; standar pembelajaran dan tujuan pembelajaran dirancang dengan harapan agar siswa mendapatkan pengetahuan, ketrampilan, karakter dan moral sebagai landasan bagi kebangsaan dan nilai-nilai universal.
2. Kurikulum 2008 ini memberikan peluang pendidikan untuk semua, karena setiap warga negara berhak memiliki akses yang sama untuk mengenyam pendidikan dengan kualitas tinggi.
3. Kurikulum 2008 ini memberikan peluang desentralisasi otoritas dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan situasi dan kebutuhan setempat.
4. Struktur kurikulum 2008 ini cukup fleksibilitas dalam hal isi, alokasi waktu dan manajemen pembelajaran.
5. Pendekatan yang berpusat kepada siswa (*student-centered*) sangat diharapkan.
6. Kurikulum 2008 ini ditujukan untuk seluruh jenis pendidikan – formal, non-formal dan informal, mencakupi seluruh kelompok target dan memungkinkan perpindahan hasil pembelajaran dan pengalaman.

2.4 Sasaran Kurikulum Inti 2008

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar ini bertujuan untuk mengembangkan siswa secara maksimal dalam hal moral, pemahaman, kenyamanan, dan potensi untuk studi lanjut dan menjalani kehidupan. Sasaran-sasaran berikut diharapkan dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan pendidikan dasar:

1. Moralitas, etika, nilai-nilai yang diinginkan, harga diri, disiplin diri, ketaatan terhadap ajaran Buddha atau menurut kepercayaan seseorang dan prinsip-prinsip Ekonomi Kekucupan;
2. Pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah, keterampilan teknologi *know-how*, dan kecakapan hidup;
3. Kesehatan fisik dan mental yang baik, kebersihan dan preferensi untuk latihan fisik
4. Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan komitmen sebagai warga negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah monarki konstitusional, dan
5. Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya Thailand dan kearifan lokal Thailand, perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan pola pikir masyarakat dengan dedikasi untuk pelayanan publik untuk perdamaian dan co-eksistensi yang harmonis.

2.5 Kompetensi Kunci Siswa

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar bertujuan menanamkan kepada peserta didik lima kompetensi kunci berikut:

1. Kemampuan Komunikasi
Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerima dan mengirimkan informasi, kemampuan dan ketrampilan berbahasa dalam mengungkapkan pikiran, pengetahuan dan pemahaman, perasaan dan pendapat untuk bertukar informasi dan pengalaman, yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat; kemampuan negosiasi untuk memecahkan atau mengurangi masalah dan konflik; kemampuan untuk membedakan dan memilih apakah akan menerima atau menghindari informasi melalui penalaran yang tepat dan penilaian yang tepat; dan kemampuan untuk memilih metode komunikasi yang efisien, mengingat kemungkinan efek negatif terhadap diri sendiri dan masyarakat.
2. Kemampuan Berfikir

Siswa diharapkan memiliki kemampuan berfikir analitis, sintesis, konstruktif, berpikir kritis dan sistematis yang mengarah kepada penelaahan pengetahuan atau informasi guna pengambilan keputusan yang bijaksana bagi dirinya sendiri dan masyarakat.

3. Kemampuan Pemecahan Masalah

Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mereduksi masalah dan hambatan, berdasarkan alasan yang tepat, prinsip-prinsip moral dan informasi yang akurat; kemampuan untuk mengapresiasi hubungan dan perubahan-perubahan dalam berbagai situasi sosial; kemampuan mencari dan menerapkan pengetahuan untuk mencegah dan memecahkan permasalahan; dan kemampuan untuk pengambilan keputusan yang bijaksana, dengan mengantisipasi kemungkinan efek negatif terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan.

4. Kemampuan Menerapkan Kecakapan Hidup

Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai proses dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar mandiri; belajar terus menerus, bekerja, dan harmonisasi sosial melalui penguatan hubungan interpersonal yang menyenangkan; kemampuan mereduksi masalah dan konflik melalui cara-cara yang tepat; kemampuan untuk penyesuaian diri untuk mengikuti perubahan sosial dan lingkungan; dan kemampuan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan yang dapat memberikan efek buruk kepada dirinya sendiri dan juga orang lain.

5. Kemampuan Menerapkan Teknologi

Siswa diharapkan memiliki kemampuan memilih dan menerapkan teknologi yang berbeda; memiliki keterampilan dalam penerapan proses teknologi untuk pengembangan diri sendiri dan masyarakat dalam hal pembelajaran, komunikasi, pekerjaan dan pemecahan masalah melalui cara-cara yang konstruktif, tepat, bersesuaian dan beretika.

2.6 Karakter anak didik yang diharapkan

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar berfokus pada pengembangan peserta didik untuk memiliki karakter yang diinginkan seperti berikut ini, sehingga memungkinkan peserta didik menikmati hidup yang selaras antara satu sama lain sebagai warga negara Thailand dan warga dunia:

1. Cinta kepada bangsa, agama dan Raja
2. Kejujuran dan integritas

3. Kedisiplinan diri
4. Antusiasme untuk belajar
5. Kepatuhan terhadap prinsip Filsafat Kemandirian Ekonomi
6. Dedikasi dan komitmen untuk bekerja
7. Menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand

2.7 Standar Pembelajaran

Perhatian terhadap prinsip-prinsip perkembangan kecerdasan otak dan multi inteligensia diperlukan untuk mencapai pengembangan peserta didik yang seimbang . Oleh karena itu, Kurikulum Inti Pendidikan Dasar telah mencanangkan delapan bidang pembelajaran sebagai berikut:

1. Bahasa Thailand
2. Matematika
3. Sains
4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya
5. Pendidikan Jasmani dan kesehatan
6. Seni
7. Okupasi dan Teknologi
8. Bahasa Asing

Untuk setiap bidang pembelajaran, standar baku berperan sebagai target yang ingin dicapai dalam mengembangkan kualitas peserta didik. Standar ini menentukan apa yang peserta didik harus tahu dan harus mampu lakukan. Standar ini juga menunjukkan nilai-nilai moral dan etika serta karakter yang diinginkan setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Selain itu, standar pembelajaran berperan sebagai mekanisme penting dalam memajukan sistem pendidikan secara keseluruhan, karena standar ini memberikan informasi kepada kita tentang isi pelajaran dan metoda pengajaran dan evaluasi. Standar juga berfungsi sebagai instrumen untuk penjaminan mutu dan diadopsi baik sebagai evaluasi penjaminan mutu internal dan maupun eksternal, yang telah dipraktekkan pada layanan pendidikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pemantauan pelaksanaan penjaminan mutu internal merupakan hal yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan tingkat keberhasilan dalam mencapai kualitas seperti yang ditentukan dalam standar yang bersangkutan.

2.8 Indikator

Indikator memberikan petunjuk apa saja yang harus diketahui dan yang harus mampu dipraktekkan oleh siswa, termasuk karakter yang diharapkan di setiap jenjang

pendidikan. Indikator merefleksikan standar pembelajaran, oleh karena itu indikator dapat dimanfaatkan untuk menetapkan isi, menentukan satuan pembelajaran, dan mengatur kegiatan belajar-mengajar. Indikator juga berperan sebagai kriteria evaluasi agar dapat memverifikasi kualitas siswa.

Indikator Tingkat Kelas menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan peserta didik untuk setiap jenjang pendidikan wajib (Pendidikan Dasar Kelas 1-Pendidikan Menengah Kelas 3, yaitu, Kelas 1 – Kelas 9)

Key Stage Indikator menentukan tujuan yang harus dicapai untuk pendidikan menengah atas (Pendidikan Menengah Kelas 4-6, yaitu atau Kelas 10-12).

Untuk pemahaman yang sama dan interpretasi yang benar, kurikulum mengatur berbagai kode untuk standar dan indikator, seperti yang terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kode untuk Standar dan Indikator

Sc 1.1 Gr 1/2	
Sc	Bidang mata pelajaran Sains
1.1	Bidang Pelajaran Pertama, Standar 1
Gr1/2	Indikator 2 untuk Kelas 1
F 2.2 Gr 10-12/3	
F	Bidang mata pelajaran Bahasa Asing
2.2	Bidang Pelajaran kedua, Standar 2
Gr 10-12/3	Indikator 3 untuk pendidikan menengah atas (kelas 4-6 SMA atau kelas 10-12)

2.9 Alokasi Waktu Belajar

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar menetapkan kerangka kerja untuk struktur waktu belajar minimal untuk delapan bidang pelajaran dan kegiatan belajar. Lembaga pendidikan dapat meningkatkan alokasi waktu, tergantung pada kesiapan dan prioritas mereka, dengan menyesuaikan menurut konteks dan situasi peserta didik sebagai berikut:

1. Jenjang Sekolah Dasar (Kelas 1-6)
Waktu belajar dialokasikan secara tahunan, dengan kondisi tidak lebih dari lima jam setiap hari.

2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (Kelas 1-3 SMP atau Kelas 7-9)
Waktu belajar dialokasikan atas dasar semester; dengan kondisi tidak melebihi enam jam setiap hari, bobot mata pelajaran tentu saja dihitung dalam kredit, kriterianya adalah bahwa 40 jam per semester adalah setara dengan satu kredit (K).
3. Jenjang Sekolah Menengah Atas (Kelas 1-3 SMA atau Kelas 10-12)
Waktu belajar dialokasikan atas dasar semester; dengan kondisi tidak kurang dari enam jam setiap hari, bobot mata pelajaran tentu saja dihitung dalam kredit, kriterianya adalah bahwa 40 jam per semester adalah setara dengan satu kredit (K).

2.10 Penetapan Struktur Waktu Belajar dan Waktu Tambahan

Tabel 2.2 menunjukkan alokasi waktu pelajaran untuk Kurikulum Inti Pendidikan Dasar 2008, dan waktu tambahan yang dilakukan oleh sekolah tergantung prioritas dan kesiapan masing-masing sekolah serta total waktu belajar bagi setiap jenjang pendidikan. Berkenaan dengan tambahan waktu yang dapat dilakukan oleh sekolah, untuk sekolah dasar waktu tambahan yang diperlukan dapat disesuaikan namun total waktu belajar harus sesuai seperti yang tertera pada Tabel 2.2 dan siswa harus mendapatkan kualitas yang ditetapkan sesuai standar dan indikator pembelajaran. Untuk sekolah dasar kelas 1-3, waktu belajar tambahan dapat dimasukkan dalam bidang pelajaran bahasa Thailand dan matematika.

Struktur waktu belajar bagi sekolah menengah harus seperti yang ditentukan dan harus memenuhi semua kriteria dan persyaratan kelulusan. Mengenai waktu belajar tambahan baik untuk tingkat sekolah dasar maupun tingkat sekolah menengah, pelajaran tambahan atau kegiatan pengembangan pelajaran dapat diatur, dengan pertimbangan terhadap

Tabel 2.2 Kurikulum Inti Pendidikan Dasar dan alokasi waktu belajar setiap jenjang

Bidang pelajaran/ Kegiatan	Waktu Belajar (jam)									
	Sekolah Dasar						Sekolah Menengah Pertama			Sek. Men. Atas
	KI 1	KI 2	KI 3	KI 4	KI 5	KI 6	KI 7	KI 8	KI 9	KI 10-12
Bidang pelajaran										
Bahasa thai	200	200	200	160	160	160	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)
Matematika	200	200	200	160	160	160	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)
Sains	80	80	80	80	80	80	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)
IPS, Agama dan Budaya	120	120	120	120	120	120	160 (4K)	160 (4K)	160 (4K)	320 (8K)
Sejarah	40	40	40	40	40	40	40 (1K)	40 (1K)	40 (1K)	80 (2K)
Agama, Moral dan Etika, PKN, Budaya dan Kehidupan Sosial	80	80	80	80	80	80	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)
Penjaskes	80	80	80	80	80	80	80 (2K)	80 (2K)	80 (2K)	120 (3K)
Seni	80	80	80	80	80	80	80 (2K)	80 (2K)	80 (2K)	120 (3K)

Okupasi dan teknologi	40	40	40	40	40	40	80 (2K)	80 (2K)	80 (2K)	120 (3K)
Bahasa Asing	40	40	40	40	40	40	120 (3K)	120 (3K)	120 (3K)	240 (6K)
Total Waktu Belajar (jenjang pendidikan)	840	840	840	840	840	840	880 (22K)	880 (22K)	880 (22K)	1.640 (41K)
Aktifitas pengembangan Belajar	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360
*Pelajaran/ Aktifitas tambahan yg boleh diberikan sekolah tergantung prioritas dan kesiapan	Tidak lebih dari 40 jam per tahun						Tidak lebih dari 200 jam per tahun			Tidak kurang dari 1.600 jam
Total waktu belajar	Tidak lebih dari 1.000 jam per tahun						Tidak lebih dari 1.200 jam per tahun			Tidak kurang dari 3.600 jam untuk 3 tahun

3 Evaluasi Pendidikan di Thailand

3.1 Ujian Nasional Untuk *Prathom - Mattayom*

Thailand menerapkan 2 (dua) Ujian Nasional bagi pendidikan jenjang *Prathom* (SD) sampai dengan *Mattayom* (SMP dan SMA), tergantung pada jenis pendidikannya. Untuk pendidikan formal, maka setiap siswa *Prathom 6*, *Mattayom 3* dan *Mattayom 6* diwajibkan mengikuti *Ordinary National Exam Test* (ONET), sedangkan siswa yang mengikuti pendidikan non-formal yang setara dengan *Mattayom 3* dan *Mattayom 6* diwajibkan mengikuti *Non-formal National Education Test* (N-NET). Selain dua Ujian Nasional di atas, dikenal juga Ujian Nasional *General Aptitude Test* (GAT) dan *Professional and Academic Aptitude Test* (PAT) yang dikhususkan bagi siswa *Mattayom 6*.

ONET bertujuan mengevaluasi kemampuan akademik siswa *Mattayom 3* dan *Mattayom 6* sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Dasar tahun 2001 dan mengevaluasi kemampuan akademik siswa *Prathom 6* sesuai dengan Kurikulum Umum Pendidikan Dasar tahun 2008. Ujian Nasional ONET menguji siswa untuk 8 (delapan) mata pelajaran utama berikut:

1. Bahasa Thai
2. Matematika
3. Sains
4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya
5. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
6. Seni
7. Karir dan Teknologi
8. Bahasa Asing

Berkean dengan N-NET, ujian ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan akademik siswa pendidikan non-formal yang setara dengan *Mattayom 3* (setara dengan Paket B di Indonesia) dan *Mattayom 6* (setara dengan Paket C di Indonesia) sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Non-Formal tahun 2008. Selain mengevaluasi kemampuan akademik, ujian ini juga menilai kemampuan dan ketrampilan siswa guna studi lanjut setelah menyelesaikan pendidikan di setiap tingkatan. Ujian N-NET mengukur kemampuan akademik siswa dengan format pilihan berganda untuk 5 (lima) mata pelajaran utama berikut ini,

1. Keterampilan Belajar

2. Dasar-dasar Pengetahuan Umum
3. Dasar-dasar Pengetahuan Kerja
4. Kecakapan Hidup
5. Perkembangan Sosial

Sejak tahun 2009, di Thailand dilaksanakan ujian nasional yang dikenal dengan istilah GAT/PAT untuk siswa *Mattayom* 6. Hasil dari ujian GAT/PAT dapat digunakan oleh peserta sebagai salah satu syarat penerimaan universitas di Thailand, lembaga pendidikan tinggi lainnya, serta untuk melamar kerja jika yang bersangkutan memutuskan tidak meneruskan pendidikan lanjut. Ujian ini dilaksanakan 2 (dua) kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan Oktober.

Ujian Nasional baik ONET maupun NNET dan GAT/PAT dilaksanakan oleh the National *Institute of Educational Testing Services* (NIETS) setahun sekali. NIETS merupakan sebuah organisasi publik independen yang tidak berkaitan secara langsung dengan Kementerian Pendidikan Thailand. Badan ini bertanggung-jawab dalam pembuatan soal, pelaksanaan dan evaluasi ujian nasional di Thailand. Tabel 3.1 menunjukkan mata pelajaran yang diuji pada ujian nasional di berbagai tingkatan serta waktu dan bulan pelaksanaannya.

Hasil Ujian Nasional tidak menyatakan seorang siswa lulus atau tidak lulus. Ujian Nasional hanya memberikan hasil yang dicapai oleh seorang siswa. Kelulusan siswa dinyatakan melalui ujian sekolah (internal), jadi artinya selain ujian nasional, siswa juga harus mengikuti ujian sekolah yang akan menyatakan siswa tersebut lulus atau tidak lulus dari sekolah tersebut. Bagi siswa yang tidak lulus ujian sekolah, siswa tersebut tidak dapat diterima di sekolah lanjut. Oleh karena itu ada beberapa pilihan bagi siswa yang tidak lulus, antara lain belajar mandiri lalu mengulang lagi ujian sekolah, mengulang satu atau dua semester di kelas yang sama lalu ikut kembali ujian sekolah, sampai yang bersangkutan dinyatakan lulus.

Penerimaan siswa untuk masuk ke jenjang berikutnya, misalnya lulusan *Prathom* (SD) ingin masuk ke *Mattayom*, tidak semata-mata ditentukan dari hasil Ujian Nasional melainkan juga ditentukan oleh hasil ujian sekolah. Antara satu sekolah dengan sekolah lainnya menerapkan kebijakan yang berbeda dalam penerimaan siswa dari jenjang sebelumnya. Setiap sekolah memberikan alokasi penerimaan dengan persentase tertentu bagi calon siswa yang tinggal di daerah sekitar sekolah. Untuk kasus seperti ini penerimaan dilakukan melalui undian tanpa melihat tinggi rendahnya nilai Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah. Sejumlah persentase tertentu diberikan kepada calon siswa yang berasal dari luar daerah di mana sekolah berada. Dalam hal ini, sekolah akan memberikan persyaratan penerimaan berdasarkan nilai Ujian

Tabel 3.1 Mata Pelajaran dan Jumlah soal yang diuji pada Ujian Nasional

No	Ujian	Mata Pelajaran	Jumlah soal	Waktu (menit)	Pelaksanaan Ujian	Total soal/total waktu
1	O-NET untuk <i>Pratom 6</i>	1. Bahasa Thai	25	50	Februari	233 soal/6 jam 40 menit
		2. Ilmu Sosial	50	50		
		3. Bahasa Inggris	40	50		
		4. Matematika	20	50		
		5. Sains	32	50		
		6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	23	30		
		7. Seni	20	30		
		8. Ketrampilan	23	30		
	O-NET untuk <i>Mattayom 3</i>	1. Bahasa Thai	52	90	Februari	347 soal/9 ½ jam
		2. Ilmu Sosial	50	90		
		3. Bahasa Inggris	50	90		
		4. Matematika	30	90		
		5. Sains	45	90		
		6. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	38	40		
7. Seni		38	40			

		8. Ketrampilan	44	40		
	O-NET untuk <i>Mattayom 3</i>	1. Bahasa Thai	80	120		501 soal/12 jam
		2. Matematika	80	120		
		3. Sains	90	120		
		4. Ilmu Sosial, Agama dan Budaya	40	120		
		5. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	90	120		
		6. Seni	40	40		
		7. Karir dan Teknologi	37	40		
		8. Bahasa Asing	44	40		
2	N-NET					
3	GAT	1. Membaca, Menulis, Berfikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah	20	90	Oktober dan Maret	
		2. Ketrampilan komunikasi bahasa Inggris	60	90		
4	PAT	Matematika	50	180	October, and	

		Sains	100	180	March		
		Rekayasa	70	180			
		Arsitek	33	180			
		Profesi mengajar	150	180			
		Seni rupa	100	180			
		Bahasa Asing					
		Bahasa	Perancis	100	180		
			Jerman	100	180		
			Jepang	100	180		
			Cina	100	180		
			Arab	100	180		
			Pali	100	180		
		Ilmu Sosial	50	90			
		Bahasa Inggris	80	90			
		Matematika	30	90			
		Fisika	25	90			
		Kimia	50	90			
		Biologi	100	90			

Sekolah dan Ujian Nasional. Masing-masing hasil ujian nasional dan sekolah diberi bobot guna menentukan nilai yang diterima di sekolah tersebut. Secara umum, bobot yang diberikan lebih tinggi kepada hasil ujian sekolah daripada kepada hasil ujian nasional.

3.2 Ujian Masuk Universitas

Bagi siswa *Mattayom 6* (kelas 3 SMA), mereka memiliki kesempatan untuk mengikuti ujian masuk universitas sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama semasa masih berada di semester ke 2 di *Mattayom 6*, yaitu pada bulan November dan satu lagi setelah selesai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada bulan Maret. Perlu dicatat hingga saat ini, tahun akademik di Thailand dimulai dari Mei sampai Oktober untuk semester 1 dan November sampai Maret untuk semester 2. Namun dalam dua tahun ke depan, tahun akademik ini akan berubah mengikuti tahun akademik yang berlaku di ASEAN. Ujian masuk universitas ini dilaksanakan serentak di seluruh negeri pada hari yang sama dengan soal yang sama. Mata pelajaran yang diuji sama seperti yang diuji pada ujian nasional sehingga memakan waktu total sekitar 5 (lima) hari.

Ada 2 (dua) sistem yang diterapkan untuk penerimaan mahasiswa ke jenjang universitas di Thailand. Yang pertama adalah sistem penerimaan melalui Ujian Masuk Nasional. Sistem ini mengizinkan seorang calon melamar sampai 3 (tiga) jurusan di satu atau lebih universitas, sehingga total yang dipilih adalah tiga jurusan. Calon mengikuti ujian masuk universitas secara nasional seperti yang telah dijelaskan di paragraf sebelumnya, dengan rata-rata 7 mata pelajaran yang diuji. Nilai dari ujian masuk nasional ini akan digunakan sebagai landasan untuk penerimaan di jurusan yang dilamar. Setiap jurusan biasanya menerapkan *passing grade* yang berbeda untuk diterima di jurusan masing-masing. Jika jumlah calon yang memiliki nilai di atas *passing grade* melebihi kuota yang disediakan, maka calon akan dijarang berdasarkan rangking nilai hasil ujian atau kombinasi ujian saringan masuk nasional dan ujian nasional *Mattayom 6*. Akan tetapi, lulus dari Ujian Masuk Universitas secara nasional tidak menjamin calon mahasiswa langsung diterima di Fakultas/Jurusan yang dilamar, melainkan memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk ikut saringan berikutnya, yaitu wawancara di fakultas/jurusan yang dilamar. Sama seperti pada Ujian Nasional di sekolah *Prathom* dan *Mattayom*, Ujian Saringan Masuk Universitas secara nasional juga dilaksanakan oleh NIETS.

Metoda kedua yaitu penerimaan mahasiswa melalui Sistem Penerimaan (*Admission System*). Sejumlah fakultas di sejumlah universitas di Thailand mulai membuat sistem penerimaan tersendiri tidak melalui system ujian masuk nasional sejak beberapa tahun yang lalu. Fakultas ini, misalnya *International College* seperti *Mahidol University*

International College, hanya meminta hasil nilai Bahasa Inggris dari Ujian Masuk Nasional, lalu calon mahasiswa mengikuti ujian secara langsung di Fakultas tersebut. Kelulusan ditentukan langsung oleh fakultas yang bersangkutan.

4 Standar Pendidikan dan Penjaminan Mutu

Pembentukan standar pendidikan bertujuan untuk menentukan kualitas tertentu dalam pelayanan pendidikan, seperti kualitas peserta didik yang diinginkan, kurikulum, dan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas, institusi pendidikan diharapkan untuk mengembangkan keunggulan dalam domain kegiatan rutin mereka dan tugas-tugas administratif, sehingga kualitas pendidikan akan berkembang. Peningkatan kualitas pendidikan akan bermanfaat secara langsung kepada penerima layanan, termasuk siswa dan orang tua, serta penerima tidak langsung, seperti pengusaha, individu, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan dan dari semua jenis, dua tugas utama yang harus dilakukan adalah pengembangan standar pendidikan dan pengembangan penjaminan mutu. Saat ini ada tiga jenis standar: standar pendidikan nasional, dan standar penjaminan mutu internal serta penjaminan mutu eksternal.

4.1 Standar Pendidikan Nasional

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, Kantor Dewan Pendidikan bertanggung jawab untuk mengusulkan standar pendidikan nasional. Dengan demikian, susunan standar yang dirumuskan oleh Kantor tersebut melalui kerjasama dengan kantor-kantor yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar, kejuruan, dan pendidikan tinggi serta Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penjaminan Mutu (*Office for National Education Standards and Quality Assessment*, ONESQA). Dengan persetujuan dari Dewan Menteri pada tanggal 26 Desember 2004, lembaga memberikan pendidikan di semua tingkatan diharapkan mematuhi standar pendidikan nasional, yang terdiri dari tiga kategori:

- I. Memenuhi karakteristik rakyat Thailand, baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat dunia, terdiri lima indikator: 1) kesehatan fisik dan mental yang baik, 2) pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalani hidup yang bermakna dan pembangunan sosial, 3) keterampilan dalam belajar dan penyesuaian diri; 4) keterampilan sosial, dan 5) kejujuran, pola pikir, dan kesadaran sebagai warga negara Thailand dan warga negara dunia.
- II. Pedoman bagi penyediaan pendidikan terdiri dari tiga indikator: 1) pengembangan kurikulum dan diversifikasi suasana yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka miliki; 2) Pengembangan tenaga

administrasi, guru, dosen, pegawai dan tenaga kependidikan secara sistematis dan efektif, dan 3) menjalankan pengelolaan berbasis sekolah.

- III. Pedoman untuk menciptakan masyarakat belajar/masyarakat berpengetahuan terdiri dari tiga indikator: 1) penyediaan layanan akademik dan terjalinnya kerjasama antara institusi pendidikan dengan masyarakat sehingga dapat mengubah institusi pendidikan menjadi masyarakat belajar / masyarakat berpengetahuan; 2) penelitian dan studi, promosi dan dukungan bagi sumber-sumber dan mekanisme belajar mengajar; dan 3) pengembangan dan pengelolaan ilmu pengetahuan bagi kepentingan semua strata dan komponen masyarakat.

Standar pendidikan nasional juga berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan mekanisme standar penilaian penjaminan mutu internal dan eksternal. Pada saat ini, semua lembaga terkait telah mengembangkan standar pendidikan yang relevan.

4.2 Penjaminan Mutu Internal

Sejak tahun 2003, Kementerian Pendidikan Thailand telah menetapkan peraturan menteri yang berkaitan dengan sistem, kriteria, dan metode untuk penjaminan mutu internal bagi institusi pendidikan dasar dan tinggi. Sebagai dasar bagi penjaminan mutu eksternal, semua institusi pendidikan diwajibkan mengikuti pedoman standar penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh lembaga mengawasi mereka. Institusi pendidikan juga diharuskan untuk menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang terdiri dari pengendalian, audit, dan penilaian.

Dalam rangka mendukung upaya-upaya ini, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan seperti, mengembangkan personal, menerapkan proyek percontohan, menyediakan dukungan keuangan, pelaksanaan, pemantauan, dan pendampinga; dan penyebaran dokumen, media dan peralatan.

4.3 Penjaminan Mutu Eksternal

Undang-Undang Pendidikan Nasional Thailand yang berlaku efektif mulai tanggal 20 Agustus 1999 mengamanatkan pembentukan Kantor Standar Pendidikan Nasional dan

Penjaminan Mutu (*Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA*) yang berperan sebagai institusi independen yang bertanggungjawab mengevaluasi kualitas pendidikan mulai dari tingkat nasional sampai kepada tingkat desa. Pengumuman pembukaan kantor ini diterbitkan dalam Lembaran Negara, Vol.117.

Penjaminan mutu terhadap semua institusi pendidikan dilakukan paling tidak sekali dalam lima tahun. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada institusi - institusi terkait dan diumumkan secara luas kepada masyarakat umum. Penilaian penjaminan mutu eksternal dilaksanakan menggunakan pendekatan "Model Penilaian Kesepakatan" ("Assessment Model Amicable") yang dilakukan oleh penilai eksternal terlatih yang direkrut organisasi swasta, profesional atau akademis dengan kualifikasi yang memenuhi syarat sebagai penilai penjamin mutu eksternal. ONESQA mengawasi penilaian penjaminan mutu eksternal naik untuk pendidikan baik dasar maupun pendidikan tinggi yang mencakup standar-standar yang berkaitan dengan prestasi pendidikan (keluaran); input / proses; dan efisiensi dalam administrasi dan kepemimpinan. Standar-standar yang berbeda diterapkan dalam penilaian penjaminan mutu eksternal antara yang diberlakukan pada pendidikan dasar dan pendidikan tinggi.

Pada periode evaluasi putaran pertama, kurun 2001-2005, ONESQA telah melakukan evaluasi penjaminan mutu eksternal terhadap 35,159 sekolah dasar dan menengah. Perlu dicatat disini bahwa penjaminan mutu eksternal pada masa itu adalah sesuatu hal yang baru bagi sekolah-sekolah. Akibatnya 65% dari sekolah yang dievaluasi masuk ke dalam katagori yang tidak dapat memenuhi nilai standar ambang terendah. Putaran kedua dilaksanakan dalam kurun 2006-2010. Pada periode kedua, evaluasi lebih menekankan pada verifikasi standard dan kualitas seluruh sekolah di seluruh negeri guna meyakini apakah ada perubahan-perubahan yang dilakukan setelah hasil evaluasi putaran pertama. Sampai pertengahan 2010, total sudah sebanyak 39,712 sekolah dasar dan menengah yang dievaluasi oleh ONESQA.

Kerja keras ONESQA untuk mengevaluasi penjaminan mutu eksternal semua sekolah dasar dan menengah mendapat pujian dan pengakuan dari berbagai pihak pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena ONESQA telah mampu melakukan evaluasi terhadap semua sekolah sesuai seperti yang ditargetkan dan sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Selain itu, ONESQA juga dinilai sangat transparan di dalam penilaian dan penyebaran hasil evaluasi kepada publik. Oleh karena itu Pemerintah Thailand telah memanfaatkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh ONESQA sebagai bahan dasar bagi perumusan kebijakan pendidikan nasional. Konsep kebijakan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Kesepuluh juga menggunakan informasi dan data dari ONESQA. Semua ini menunjukkan keberhasilan

ONESQA dalam mengembankan misinya sebagai institusi independen untuk mengevaluasi penjaminan mutu eksternal sekolah-sekolah di Thailand.

5 Pengembangan dan Pembinaan Guru

Guru dan tenaga administrasi pendidikan memainkan peranan yang penting dalam reformasi proses pendidikan dan mereka merupakan agen perubahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan guru dan staf pendukung pendidikan menjadi masalah krusial dalam reformasi pendidikan di Thailand. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan status dan standar profesi guru.

5.1 Pengembangan Pendidikan Guru

Sama seperti di Negara-negara lain, Fakultas Pendidikan di Thailand biasanya menawarkan program sarjana 4 tahun. Sejak tahun 2005, sejumlah Fakultas Pendidikan ditugaskan menjalankan program sarjana 5 tahun. Program ini merekrut calon-calon mahasiswa yang pintar dan berbudi baik untuk dipersiapkan menjadi profesi guru. Pada waktu itu, mahasiswa tahun pertama pada program ini diberikan beasiswa sebesar 2,039 USD per orang. Setelah selesai program, yang terdiri dari 3,5 tahun kuliah dan 1,5 tahun praktek mengajar, lulusan diharapkan menerima gaji lebih tinggi dari sarjana biasa. Dosen-dosen pada program ini bekerja sama sangat baik dengan sekolah-sekolah yang akan dilibatkan untuk praktek mahasiswa. Dosen-dosen langsung berperan sebagai mentor selama mahasiswa melakukan praktek mengajar di sekolah-sekolah.

Office of Basic Education Commission (setara dengan Direktorat Pendidikan Dasar) Kementerian Pendidikan Thailand telah mengevaluasi program sarjana 5 tahun untuk mempersiapkan guru dan menyimpulkan bahwa program seperti ini mampu menarik siswa pintar untuk belajar di bidang pendidikan sehingga dapat menghasilkan guru-guru yang berkualitas di masa mendatang. Karena saringan yang cukup ketat, dipastikan bahwa penerima beasiswa merupakan mahasiswa yang sangat potensial untuk menjadi guru yang berkualitas. Oleh karena itu, sejumlah dekan Fakultas Pendidikan mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Guru agar program ini diteruskan.

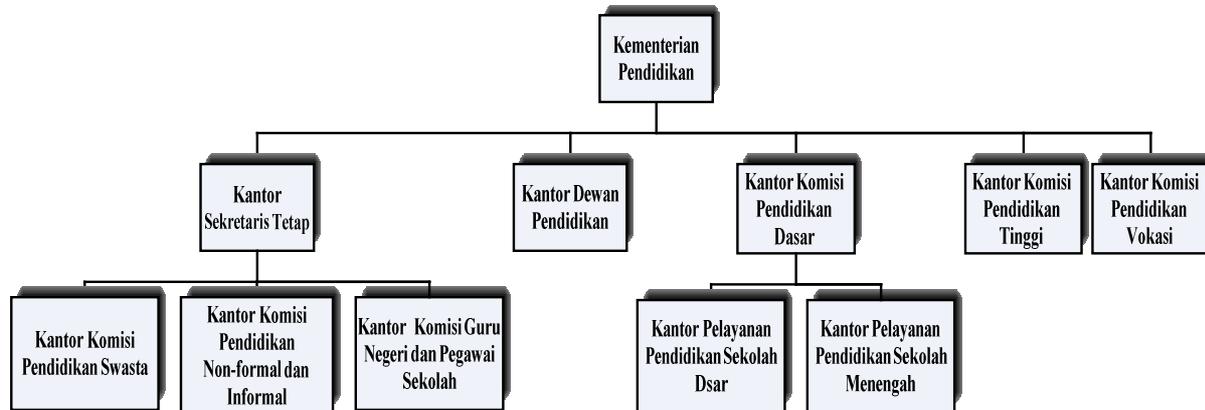
5.2 Kualifikasi dan Perekrutan Guru

Gambar 5.1 menunjukkan struktur organisasi Kementerian Pendidikan Thailand. Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah bertanggung-jawab mengevaluasi

kebutuhan guru dan merekrut guru secara nasional setiap tahun. Kantor ini yang akan memberikan ujian seleksi penerimaan guru secara nasional. Dalam pelaksanaan ujian seleksi penerimaan guru berlaku aturan-aturan berikut yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat:

1. Seluruh proses ujian masuk harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus transparan dan dapat diverifikasi.
2. Ujian harus dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah
3. Komite Ujian dapat memutuskan institusi pendidikan mana yang bertanggung-jawab untuk menyusun soal, mendistribusikan, mengumpulkan dan mengevaluasi jawaban.
4. Pengumuman ujian penerimaan guru harus dilaksanakan ke masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian dilaksanakan. Pengumuman harus secara jelas mencantumkan hal-hal berikut:
 - Posisi dan gaji yang ditawarkan
 - Jumlah yang akan diterima
 - Deskripsi Pekerjaan
 - Kualifikasi umum dan khusus
 - Prosedur aplikasi, biaya dan jadwal ujian
 - Dokumen dan identitas yang diperlukan
 - Kriteria kelulusan
 - Persyaratan lainnya
6. Waktu penerimaan lamaran tidak boleh kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum ujian dimulai.
7. Jika pelaksanaan ujian harus dilakukan di beberapa wilayah pada hari yang sama, maka setiap pelamar hanya bisa ikut ujian di satu wilayah saja. Jika nama yang bersangkutan muncul di wilayah lain, maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi.
8. Seorang pelamar dinyatakan lulus jika peserta mendapatkan nilai lebih dari 60% untuk setiap bagian yang diuji.

Ada sejumlah aturan lainnya yang pada hakikatnya mengarahkan agar pelaksanaan ujian penerimaan guru dilaksanakan secara jujur, terbuka dan transparan. Perlu dicatat bahwa sistem penerimaan guru masih dikendalikan dengan cara sentralisasi, walaupun pelaksanaan ujian dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Kualifikasi guru yang diterima di sekolah-sekolah di Thailand minimum harus memiliki pendidikan sarjana 4 tahun dan maksimum memiliki pendidikan doktor.



Gambar 5.1 Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Thailand

5.3 Pelatihan Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah

Dengan perubahan paradig pendidikan dari situasi yang berpusat kepada guru (*teacher-centered*) ke yang berpusat kepada siswa (*learner-centered*), maka seorang guru harus bisa berfungsi sebagai fasilitator sehingga siswa mandiri dalam berfikir, bertindak dan memecahkan masalah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Berdasarkan reformasi pendidikan sekarang ini, guru-guru Thailand didorong dan didukung untuk mendapatkan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelatihan-pelatihan berikut merupakan aktifitas yang khusus disiapkan bagi guru dan pegawai sekolah.

1. Pengembangan Program Pendidikan Lima Tahun Pra-Tugas

Program ini menghendaki calon guru menyelesaikan sarjana lima tahun sebelum bertugas menjadi guru atau diterima menjadi guru, yang terdiri dari 4 (empat) tahun kuliah dan 1 (satu) tahun pelatihan mengajar di sekolah yang telah ditentukan. Lulusan dari luar jurusan pendidikan guru yang akan menjadi guru harus mengikuti program bersertifikat 1 tahun sebelum disertifikasi untuk menjadi guru.

2. Pelatihan bagi guru tetap Bahasa Inggris

Sejumlah instansi, termasuk Kantor Komisi Pendidikan Vokasi melaksanakan aktifitas pelatihan untuk guru Bahasa Inggris di bawah pengawasan instansi tersebut. Sementara pada Kantor Komisi Pendidikan Dasar, guru-guru di bawah direktorat ini dilatih berdasarkan Rencana Strategis Reformasi Proses Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Percepatan Kemampuan Kompetitif Nasional yang telah disetujui oleh Dewan Menteri pada tahun 2006. Program ini telah dijalankan sejak tahun 2007. Menurut Rencana Strategis ini, Lembaga Bahasa Inggris yang didirikan oleh Kantor Komisi Pendidikan Dasar bertanggung-jawab menetapkan kriteria pelatihan guru Bahasa Inggris melalui kerja sama dengan institusi lain, terutama dengan *English Resource and Instructional Centres* (ERIC) di seluruh wilayah Thailand dan *British Council* serta *American University Alumni* (AUA), dengan bantuan pendanaan dari Pemerintah.

Aktifitas pelatihan berfokus pada 5 (lima) katagori standar nasional kemampuan guru Bahasa Inggris yang mencakup kompetensi linguistik, kompetensi komunikasi, pengetahuan teori pengajaran bahasa asing, kemampuan mengorganisasikan pembelajaran konsisten dengan silabus, dan pengembangan profesi berkelanjutan. Lembaga Bahasa Inggris bertujuan melatih seluruh guru Bahasa Inggris di Thailand sampai mereka mencapai

katagori *Advanced Level*. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini bekerja sama dengan dinas pendidikan di seluruh wilayah Thailand. Rata-rata setiap tahun lembaga ini memberikan pelatihan kepada sekitar 30-40 ribu guru bahasa Inggris.

3. Pelatihan Guru Tetap Matematika dan Sains
Institut Promosi Pengajaran Sains dan Teknologi, sebuah lembaga independen di bawah supervisi Kementerian Pendidikan, merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan guru, supervisor dan tenaga administrasi dalam bidang sains, matematika dan teknologi informasi.
4. Penyelesaian Sarjana Pendidikan Bagi Guru Tetap.
Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, sertifikasi profesi mengajar diwajibkan bagi seorang guru tetap dan direktur sekolah dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut calon harus memiliki kualifikasi minimum sarjana dalam bidang pendidikan. Universitas Rajabhat (sejenis universitas pendidikan di Indonesia) telah melaksanakan program khusus ini bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana sejak tahun 2003. Berdasarkan laporan dari kementerian Pendidikan sejak tahun 2008 seluruh guru di Thailand telah memenuhi kualifikasi minimum sarjana.
5. Program Sertifikat dan Pasca-Sarjana Pendidikan
Guru-guru yang kualifikasi sarjananya bukan dari bidang pendidikan didorong untuk mengikuti program bersertifikat atau pasca sarjana pendidikan.
6. Program bersertifikat bagi Tenaga Administrasi
Tenaga Administrasi Kependidikan harus memiliki sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat ini, seseorang harus memiliki kualifikasi sarjana atau *Post-Graduate Certificate* dalam bidang Administrasi Pendidikan jika sarjananya bukan berasal dari bidang pendidikan. Universitas Pendidikan Rajabhat memiliki program sertifikasi bagi tenaga-tenaga adminisntrasi sekolah. Program ini dilaksanakan di sekolah terkait atau di kota dimana sekolah tersebut berada. Sehingga tenaga-tenaga administrasi dari berbagai sekolah di satu daerah dapat mengikuti program sertifikat ini tanpa harus meninggalkan tempat kerja.
7. Program *Master* bagi tenaga administrasi

Tenaga administrasi pendidikan yang memiliki gelar sarjana didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana dalam bidangnya.

5.4 Remunerasi dan Promosi

Dalam upaya menarik calon-calon yang berkualifikasi untuk menjadi guru dan mengusahakan agar mereka tetap bertahan, Kementerian Pendidikan telah menetapkan skala penggajian baru. Skala penggajian baru mengatur gaji guru berdasarkan katagori guru dan tingkat promosi mulai dari 1-24. Berdasarkan kualifikasinya guru diklasifikasikan menjadi Asisten Guru, Guru, Guru Ahli, Guru dengan keahlian khusus, Guru Spesialis, dan Spesialis Senior, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1. Seorang guru baru dengan kualifikasi sarjana dari program pendidikan akan diterima menjadi guru dengan kualifikasi Asisten Guru. Setelah mengikuti pelatihan-pelatihan bersertifikat dan mendapat promosi beberapa tingkat, guru tersebut dapat mengusulkan menjadi katagori Guru dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Jika memenuhi persyaratan dan dinaikkan klasifikasinya maka yang bersangkutan akan mendapatkan kenaikan gaji. Misalnya Asisten Guru yang berada pada tingkat promosi 7 dengan gaji sebesar 16,190 bath mengusulkan untuk menjadi katagori Guru dan diterima, maka yang bersangkutan akan berada pada posisi Guru dengan tingkat promosi 7 dengan gaji 18,690 bath. Demikian seterusnya untuk katagori-katagori yang lain.

Selain gaji, guru juga menerima tunjangan yang besarnya tergantung dari klasifikasi guru. Besaran tunjangan berkisar antara 3,500 sampai dengan 13,000 bath per bulan untuk katagori guru ahli sampai spesialis senior. Sedangkan Asisten Guru dan Guru tidak menerima tunjangan tambahan selain gaji. Promosi gaji didasarkan pada evaluasi kinerja guru, yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dimana sekolah itu berada. Evaluasi kinerja guru dilaksanakan 2 kali setahun yaitu selama periode 1 Oktober s/d 31 Maret dan periode 1 April s/d 30 September. Kriteria Promosi Gaji mencakup dua aspek, yaitu aspek capaian akademik dan aspek perilaku dan kinerja. Penilaian terhadap capaian akademik meliputi kualitas, kuantitas, akurasi, ketepatan, kedisiplinan, kemahiran, kerja sama tim, kreatifitas, fleksibilitas dan kemampuan riset. Sedangkan aspek perilaku dan kinerja mencakup penilaian terhadap absensi, kehadiran dalam menjalankan tugas, kehadiran pada upacara-upacara peringatan hari nasional dan pameran ilmiah.

Calon guru pertama kali diterima di sekolah selalu diangkat dengan katagori Asisten Guru, kecuali bagi guru yang mempunyai pengalaman mengajar. Gaji awal Asisten Guru ditentukan oleh kualifikasi akademik ketika melamar.

Tabel 5.1 Klasifikasi Gaji Guru di Thailand

Tingkat Promosi	Katagori Guru					
	Asisten Guru	Guru	Guru Ahli	Guru dengan keahlian khusus	Guru Spesialis	Spesialis Senior
	Gaji per bulan, Bath					
1	11920	11920	14660	14660	27090	31820
1.5	12240	12240	15050	15050	27840	32680
2	12530	12530	15430	15430	28590	33570
2.5	12840	13860	15800	15800	29330	34440
3	13160	14220	16190	16190	30090	35340
3.5	13570	15440	17970	16640	30850	36240
4	13770	15840	19460	17100	31630	38180
4.5	15300	16260	16650	17560	32390	39180
5	14660	16670	20470	18010	33150	41190
5.5	15050	17070	20960	18480	33920	42220
6	15430	17710	21460	18950	34690	44280
6.5	15800	18270	21950	19410	35480	45310
7	16190	18690	22460	19860	36780	46350
7.5	16570	19100	22940	22050	38190	47390
8	16920	19920	23450	23280	40420	48550

8.5	17310	20320	23940	23910	42020	49480
9	17690	20750	24440	24510	43590	50530
9.5	19100	21150	24930	25190	44350	21590
10	19510	21570	25440	25740	45120	52630
10.5		22000	25930	26350	45900	53690
11		22450	26450	26970	46670	54750
11.5		22890	26980	27580	47450	55800
12		23360	27500	28190	48220	56860
12.5		23810	28050	28810	49000	57940
13		24290	28590	29420	49880	59000
13.5		24750	29140	30020	50550	60060
14		25240	29690	30620	51850	61140
14.5		25730	30280	31250	53450	62200
15		26210	30850	31870		63270
15.5		26710	31440	32510		64340
16		27210	32060	33140		65440
16.5		27710	32650	33800		66680
17		28210	33260	34470		67750
17.5		28710	33850	35120		
18		29190	34430	35800		
18.5		29700	35050	36660		
19		30190	35640	37320		

19.5		30710		37980		
20		31190		38620		
20.5				39280		
21				40590		
21.5				41230		
22				42020		
22.5				42790		
23				43570		
23.5				44350		
24				45120		

Tabel 5.2 Tunjangan Guru Thailand

Kategori Guru	Besar Tunjangan per bulan, Bath
Spesialis Senior	13,000
Guru Spesialis	9,900
Guru dengan keahlian khusus	5,600
Guru Ahli	3,500
Guru	-
Asisten Guru	-

Gaji Asisten Guru paling rendah dengan kualifikasi sarjana pendidikan 4 tahun yaitu sebesar 11,920 Bath per bulan dan paling tinggi yang berasal dari program doktor dengan besaran 19,100 Bath, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.3. Jika dihubungkan antara Tabel 5.3 dengan Tabel 5.1, maka asisten guru dengan kualifikasi sarjana dengan pendidikan 4 tahun berada pada tingkat promosi 1 dan asisten guru dengan kualifikasi doktor sudah langsung berada pada tingkat promosi 9.5.

Tabel 5.3 Gaji awal guru Thailand berdasarkan kualifikasi akademik

No	Kualifikasi	Katagori Guru	Gaji per bulan, Bath	
			Tunjangan	Gaji
1	Doktor	Asisten Guru	-	19,100
2	Master	Asisten Guru	-	16,570
3	Master yang disamakan	Asisten Guru	-	15,430
4	Sarjana dari program pendidikan 6 tahun	Asisten Guru	-	15,430
5	Sarjana dari program pendidikan 5 tahun	Asisten Guru	-	12,530
6	Sarjana dari program pendidikan 4 tahun ditambah dengan diploma/pelatihan 1 tahun	Asisten Guru	-	12,530
7	Sarjana dari program pendidikan 4 tahun	Asisten Guru	-	11,920

Seluruh data-data adalah berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan pada Desember 2012. Informasi yang diperoleh menyatakan bahwa akan ada kenaikan gaji guru dalam waktu dekat yang akan diumumkan pada awal tahun 2014.

Selain bentuk promosi gaji dan tunjangan di atas, guru-guru diberikan kesempatan untuk mengembangkan kualifikasi akademiknya ke jenjang lebih tinggi melalui studi lanjut master atau doktor. Kementerian Pendidikan menyediakan beasiswa bagi guru-guru yang memenuhi syarat untuk melanjutkan studi ke

jenjang master dan doktor. Saat ini Thailand mengalami kekurangan guru yang berkualitas dalam bidang sains dan matematika, sehingga perekrutan guru dan penugasan guru ke studi lanjut dalam bidang ini mendapat perhatian besar dari Pemerintah.

6 Pendanaan Pendidikan

Pada tahun 2012, anggaran belanja Pemerintah Thailand sebesar 2,4 triliun Bath atau setara dengan 800 triliun rupiah. Alokasi anggaran terbesar jatuh pada Kementerian Pendidikan yaitu sekitar 19,18 % dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand. Dengan demikian ada perbedaan mendasar dalam hal persentase alokasi anggaran pendidikan antara Indonesia dan Thailand. Pada anggaran belanja negara Indonesia dialokasikan sebesar 20 % bagi pendidikan, termasuk pendidikan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara hampir 20% alokasi anggaran di Thailand jatuh kepada Kementerian Pendidikan.

6.1 Pendanaan Sekolah Negeri dan Swasta

Pembiayaan sekolah negeri seluruhnya berasal dari Pemerintah. Sekolah-sekolah mengusulkan kebutuhan pembiayaan kepada Dinas Pendidikan Wilayah, yang selanjutnya setelah dikompilasi oleh Dinas akan diteruskan Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar atau Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah tergantung jenjang sekolahnya. Setelah Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini melakukan kompilasi dari seluruh wilayah, usulan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.2. Selanjutnya usulan ini disampaikan pada sidang kabinet. Persetujuan besaran usulan anggaran dari setiap kementerian baru akan sah setelah mendapat persetujuan dari parlemen Thailand. Dalam hal ini proses pengusulan anggaran pada hakikatnya sama persis seperti di Indonesia.

Dalam pelaksanaan pendanaan, pembiayaan seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah negeri dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. Dengan demikian siswa dapat menikmati sekolah gratis selama 12 tahun akademik, 6 tahun pada *Prathom*, dan 6 tahun *Mattayom* atau sekolah vokasi. Pemahaman sekolah gratis menyatakan bahwa orang tua sama sekali tidak ditarik biaya apapun untuk kebutuhan anaknya di sekolah. Bahkan dengan biaya sekolah gratis ini, siswa mendapatkan berbagai keuntungan tambahan dari Pemerintah seperti yang akan dijelaskan pada paragraf berikut.

Pada tingkat *Prathom* atau Sekolah Dasar, selain sekolah gratis, selama 6 tahun sekolah, siswa akan mendapatkan susu dan makan siang gratis yang disediakan oleh sekolah melalui pendanaan dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, siswa juga

akan mendapatkan bantuan buku teks dan alat tulis gratis yang didistribusikan oleh sekolah kepada murid-murid.

Baju seragam, sepatu dan tas biasanya dibelikan terlebih dahulu oleh orang tua, lalu pada akhir semester diganti biayanya oleh sekolah, setelah sekolah menagih kepada Dinas pendidikan Wilayah. Pemerintah membiayai operasional dan pengadaan serta perawatan sekolah mencakup pengadaan kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK), buku perpustakaan, perbaikan, pengadaan alat kantor dan laboratorium. Secara sukarela beberapa sekolah meminta kontribusi dari orang tua untuk kegiatan ekstra-kurikuler dan pengadaan guru asing, namun sifatnya tidak memaksa.

Yang menarik pada reformasi pendidikan di Thailand adalah pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program yang disebut *One Tablet Per Child* atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertujuan memperkuat siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kendala lokasi, jarak, dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai saat ini telah mengeluarkan dana sebesar 3 milyar bath atau setara dengan 96 juta USD untuk membeli sebanyak 900 ribu komputer tablet untuk keperluan pendidikan. Sampai awal tahun 2013 sebanyak 868.886 tablet telah dibagikan kepada siswa *Prathom 1* atau kelas 1 SD di seluruh Thailand, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.1. Proyek ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian ICT Thailand.



Gambar 6.1 Pembelajaran menggunakan tablet pada siswa *Prathom 1* di Thailand

Dalam pembelian komputer tablet ini, Pemerintah Thailand melakukan perbandingan harga dan spesifikasi teknis dari sejumlah pabrik. Akhirnya Pemerintah memutuskan untuk membeli komputer tablet ini dari sebuah perusahaan Cina seharga 2460 Bath per unit (setara 750 ribu rupiah) dengan sistem operasi Google Android 4



Gambar 6.2 Struktur Organisasi Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah

Ice Cream sandwich dan spesifikasi tablet 1 GB RAM, kapasitas penyimpanan 8GB. Harga tersebut telah termasuk materi pendidikan yang dimasukkan ke dalam tablet. Perlu dicatat bahwa komputer tablet ini bukan saja dibagikan kepada siswa-siswa *Prathom 1* sekolah negeri, tetapi juga kepada siswa-siswa *Prathom 1* di sekolah swasta.

Berkenaan dengan pendanaan sekolah swasta, di Thailand terdapat 3 jenis sekolah swasta, seperti dijabarkan sebagai berikut: A) sekolah swasta yang mendapat 70 persen subsidi dari Pemerintah, dimana sekolah menetapkan SPP tertinggi sesuai dengan yang diatur oleh Pemerintah; B) sekolah swasta yang sama sekali tidak menerima subsidi dari pemerintah, dimana sekolah menentukan besarnya SPP yang ditarik dari siswa dan jelas jauh lebih tinggi dari sekolah yang sebelumnya dan C) sekolah swasta yang mendapat subsidi 100 persen dari Pemerintah, misalnya sekolah yang didirikan oleh organisasi keagamaan, atau sekolah bagi anak-anak kurang beruntung secara fisik. Tabel 6.1 menunjukkan bentuk kontribusi pemerintah Thailand untuk sekolah swasta yang masing-masing menerima subsidi 70 dan 100 persen.

Tabel 6.1 Bentuk Subsidi Pemerintah Thailand terhadap sekolah swasta

Bentuk Subsidi Pemerintah Thailand kepada sekolah swasta	
Kategori A	Kategori C
Buku teks	Buku teks
Peralatan pendidikan	Peralatan pendidikan
Seragam (jika diusulkan)	Seragam
Aktifitas ekstra kurikuler	Aktifitas ekstra kurikuler
Susu (hanya untuk <i>Prathom</i>)	Susu (hanya untuk <i>Prathom</i>)
Makan siang (jika diusulkan)	Makan siang
	Komputer/peralatan laboratorium
	Biaya konstruksi dan perawatannya

6.2 Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan

Masyarakat dan orang tua berperan aktif dalam pendidikan baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta. Di mata hukum Thailand, sekolah dianggap sebagai sebuah badan hukum, karenanya diperlukan komite sekolah. Komite sekolah di Thailand pada dasarnya mirip dengan komite sekolah di Indonesia. Namun dalam hal komposisi mungkin sedikit berbeda. Komite sekolah di Thailand terdiri dari:

1. Pakar akademik sebagai penasehat
2. Direktur/kepala sekolah
3. Wakil guru
4. Wakil siswa
5. Wakil masyarakat
6. Asosiasi orang tua

Seluruh anggota komite sekolah terlibat dalam berbagai permasalahan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Mereka mengajukan gagasan atau usulan misalnya penambahan guru tertentu. Mereka juga dapat memberikan keputusan, menjalankan pengumpulan dana untuk pengembangan sekolah dan mencari dana dari sumber-sumber selain orang tua demi memajukan sekolah tersebut.

7 Penutup

Sistem pendidikan yang diterapkan di Thailand pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia, mulai pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi tidak terdapat perbedaan yang mendasar. Persamaan ini memberikan peluang yang cukup besar untuk saling berbagi pengalaman dan bekerja sama. Penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan melalui ujian nasional. Namun hasil ujian nasional di Thailand bukan memberikan lulus atau tidaknya seorang siswa. Kelulusan siswa dari sekolah lebih ditentukan oleh ujian sekolah. Hasil ujian nasional hanya menunjukkan capaian akademik siswa.

Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi secara terbuka dimana calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sajana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut master bahkan doktor.

Proses pengusulan dana yang dibutuhkan oleh sebuah sekolah pada hakikatnya sama seperti di Indonesia. APBN Thailand memberikan alokasi mendekati 20 persen kepada Kementerian Pendidikan. Dengan dana yang besar ini memungkinkan sekolah dan siswa mendapat berbagai keuntungan. Sekolah gratis berlaku sampai sekolah menengah atas. Siswa mendapat berbagai bantuan seperti buku teks, alat tulis, susu, makan siang, baju seragam, dll. Dalam upaya memperkenalkan ICT sejak dini, kepada anak kelas 1 SD di Thailand dibagikan komputer tablet, berikut dengan program-program pendidikan.

Daftar Referensi

1. Chantra Tantipongsanuruk (2013), "Personal Communication"
2. Ministry of Education (2008a), " The Basic Education Core Curriculum" Bangkok, Thailand
3. Ministry of Education (2008b), " Towards a Learning Society in Thailand: an Introduction to Education in Thailand" Bangkok, Thailand
4. Office of Education Council (2008), Education in Thailand", Ministry of Education, Bangkok, Thailand
5. Office of Education Council (2013), "Curriculum Development of Thai Basic Education", Ministry of Education, Bangkok, Thailand
6. Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA (2010) "Annual Report 2010", ONESQA, Bangkok, Thailand.
7. Siribodhi, T (2011), "Basic Education Curriculum in Thailand: Content and Reform", SEAMEO Secretariat, Bangkok, Thailand
8. Unesco (2011)"Education Profiles", Unesco Bangkok, <http://www.unescobkk.org/education/resources/resources/education-system-profiles/thailand/basic-education/>

-o0o-